

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015)



FATHUL MUHAMMAD

B111 12 150

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015)**

OLEH:

**FATHUL MUHAMMAD
B111 12 150**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015)**

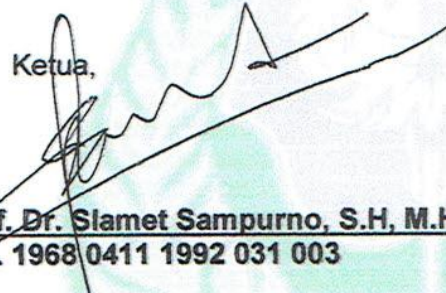
Disusun dan diajukan oleh:

**FATHUL MUHAMMAD
NIM B111 12 150**

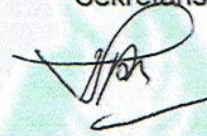
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 01 Februari 2016 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H
NIP. 1968 0411 1992 031 003

Sekretaris,


Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 1966 1212 1991 032 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **FATHUL MUHAMMAD**

No. Pokok : **B111 12 150**

Program : **ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Proposal : **Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal
Yang menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus
Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2015

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H

NIP. 1968 0411 1992 031 003

Pembimbing II


Dr. Hj. Haeranah, S.H, M.H

NIP. 1966 1212 1991 032 002

v

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

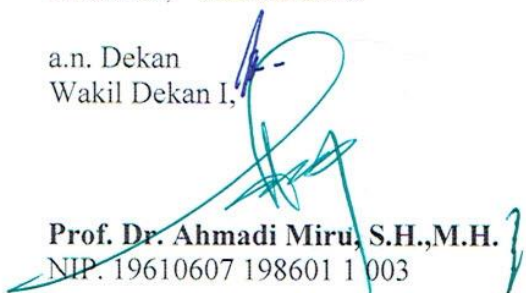
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **FATHUL MUHAMMAD**
No. Pokok : B111 12 150
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

FATHUL MUHAMMAD (B111 12 150), "*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*" di bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain : faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan.

ABSTRAK

FATHUL MUHAMMAD (B111 12 150), "The Kriminologis About Crime Begal The Using Gun Man (Studi Case In The City of Makassar, a year from 2011 to 2015)" under the guidance of Mr. Slamet them as a counselor I and Mrs. Hj. Haeranah as a counselor II.

This research for to find out what factors that cause crime robber who use sharp weapons in the city of Makassar in the past five years, and to determine the efforts of what can be done to minimize the occorence of crime robber who use sharp weapons in the city of Makassar.

The data collected then analysis by comparing the real and data about the factors that cause crime robber in the city of Makassar and the efforts of what is done by law enforcement officers.

Based on an analysis of data and the facts, the authors concluded, among others : The factors that affect the crime robber such as economic factor, the low level of education, environmental factors and the weak law enforcement that by law enforcement officers is the preventive and repressive. Efforts to preventive by the Police is information and the patrol. The repressive the taking of action for perpetrators of crimes robber trough a process of criminal justice and provide guidance in the Cumberland StateCorrectional Facility.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”**

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku Ayahanda Drg.Aliyusran,M.Kes dan Ibundaku Hasniah, sembah sujud ananda pada ayah dan bunda semoga skripsi ini menjadi awal pembuka jalan kesuksesan dan pembawa kebahagiaan buat ayah dan bunda. Kepada kakak dan adik-adikku yang besar hatinya, kakek, nenek, tante, om, saudara sepupuku yang berlimpah kasih sayangnya, keluarga besar dan kepada semua orang yang selalu menyayangi penulis memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwie Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Faridah Patittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Haeranah, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H, Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H dan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Bapak Bunga, Bapak Usman, dan Ibu Sri selaku Staf Akademik yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
8. Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.

9. Teman-teman anggota KKN reguler Kab. Bulukumba, Kec. Bontobahari, Desa Lembanna
10. Sahabat-sahabatku Yudi, Iswan, Afif, Ryan, Amriati, Sri Wahyuni, Dina, Marissa, Shulbiyah, Riri, Adhe, Fikha, Fadilla, Ni'matullah, Anca, Yusran, Isnani dan semuanya yang namanya tidak bisa penulis sisipkan satu-satu.
11. Sahabatku Ryan Angganiyu Ilham yang sedang merantau di kota orang, semoga sukses sobat.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan "PETITUM 2012".
13. Geng bureng terima kasih tak terhingga atas segalanya di hari kemarin, sekarang dan yang akan datang, semoga Allah SWT selalu senang memberikan keberuntungan untuk kalian.

Penulis percaya bahwa Allah SWT selalu memudahkan orang yang gemar memudahkan, Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Makassar, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Pengertian Kejahatan	11
3. Pengertian Begal	14
4. Pengertian Senjata Tajam	15
B. Teori-Teori Penyebab Kejahatan	16
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	35

D. Ketentuan Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan	42
E. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak	44
F. Jenis - Jenis Senjata Tajam	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis Dan Sumber Data	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perkembangan Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Di Kota Makassar	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan	56
C. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1

Jumlah Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015	37
--	----

Tabel 2

Usia Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015	39
---	----

Tabel 3

Jumlah Pendapatan Pelaku Pencurian Dengan kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015	43
--	----

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015	60
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan - peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa:

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti

¹ R.Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 26.

sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.²

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh begal.

Sebagai salah satu perbuatan salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah social, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatanakan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah

² Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000), hlm. 133.

kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatann, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Terkhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Makassar. Hal ini tetntunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Tangerang dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kota Makassar harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Ada sebuah Teori dari W.A.Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif menyeluruh dan mendalam.

Aksi begal motor di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Makassar sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Hampir setiap hari, terjadi aksi begal di Makassar dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti di Jalan Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sam Ratulangi, Makassar. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor. Dalam

catatan kepolisian, kedua kawan pembegal sadis tersebut telah banyak melumpuhkan korbannya. Saat beraksi, mereka lebih dulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam lalu mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Usai mendapat perawatan medis dari pihak rumah sakit, polisi langsung menggelandang kedua tersangka ke Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani proses hukum. Kedua pelaku pembegalan sadis tersebut akan dikenakan pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna

terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam Di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

³ Romli Atmassasmita. Teori dan kapita selekta Kriminologi (Bandung 2010). Hlm. 3.

⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010). Hlm. 9.

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi criminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikologi dan Neuropatologi kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵

Pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.

⁵ Ibid, hlm.9-10.

- b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dan kejahatan; dan
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.⁶

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat”. Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

Disamping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang

⁶ Ibid. hlm. 10-11.

⁷ Ibid. hlm. 12.

lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsure itu dapatlah dirumuskan

bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociology point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.⁸

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsure pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersbut.⁹

Menurut penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan

⁸ Ibid., hlm.16-17.

⁹ Ibid., hlm.18.

namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

3. Pengertian Begal

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan¹⁰. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja.

Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

4. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat di gunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu.

Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis senjata tajam memiliki kekuatan sakti (gaib) senjata tajam yang sakti itu disebut sebagai badik. Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian,

kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya.

Sejak ratusan tahun silam, badik di pergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda.

Secara umum badik terdiri atas tiga bagian, yakni hulu (gagang) dan bilah (besi), serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung badik. Di samping itu, terdapat pula pamor yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan pemiliknya.

B. Teori - Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun

dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa

resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)
3. Social Control (kontrol sosial)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan

tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.¹¹

1. Teori anomie

a. Emile Durkheim

Menurut ahli sosiologi asal Prancis ini, menekankan pada “normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain . Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia

¹¹ A. S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hlm 46

berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, keja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri siindividu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah “anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang

lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi anomie.¹²

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak terbatas karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, manusia telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang menetapkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasinya. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menyenangkan bagaimana ganjaran/pengendali atas apa yang orang inginkan.

b. Robert Merton

Dalam social theory and social structure yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim, Robert Merton mengemukakan bahwa anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. dengan kata lain, "*anomie is a gap between goals and means creates deviance*". Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak

¹² *Ibid.*, hlm 48

diciptakan oleh sudden social change tetapi oleh social structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur disetiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau culture goals dan institutionalised means atau accepted ways. Dan sarana inilah yang memberikan tekanan (strain).

Bedasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (a structural explanation). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga) . Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka mulai jauh di belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh talented. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan kensekuensi sosial berupa penyimpangan.

Menurut pandangan Merton dalam masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) tentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh

seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*legitimated means*). Mereka yang melakukan legitimated means tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain (keterangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Dalam “social structure and anomi” yang mana teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah abnormal, oleh karena itu penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang menyimpang.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm 41-50.

c. Cloward and Ohlin

Teori anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya Differential Opportunity dalam kehidupan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dikemukakan dalam *Delinquency and Opportunity*, bahwa kaum para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih suatu tipe subkultural lainnya (*gang*) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Untuk teori anomie menurut Cohen disebut dalam Lower Class Reaction Theory. Inti teori ini menjelaskan bahwa Delinquency timbul dari reaksi kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.¹⁴

2. Cultural Deviance Theories (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 52-53.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain:

1) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Thomas dan Znaniecky, mengaitkan hal ini dengan social disorganization, yaitu: The breakdown of effective social controls in neighborhoods and communities (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).¹⁵

Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor yang paling krusial (menentukan) bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. selanjutnya ditunjukkan bahwa cultural transmittion adalah : "*delinquency was socially leamed behavior, transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban areas*" (delinquensi adalah perilaku sosial yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm 54.

dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur).¹⁶

2) *Differential Association*

E.H Sutherland, mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

- a) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari)
- b) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- c) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- d) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 55

kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).

- e) The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
- f) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- g) *Differential association may in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu berbeda-beda dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
- h) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).

i) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan niali-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan niali-niali umum tersebut, karena tingah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).¹⁷

Teori Sutherland, merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbutannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan prosesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat atau komentar, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai saat ini.

3) Culture Conflict Theory

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan cirri-ciri seperti: kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan seringnya terjadi

¹⁷ *Ibid.*, hlm 56-58.

pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.¹⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, bahwa “setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin *bertentangan* dengan *conduct norms* kelompok lain”.

Sellin, membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik *primer* terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*), sedangkan konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik ini terjadi ketika satu masyarakat *homogen* atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.¹⁹

Culture conflict theory terdiri dari *subculture theories*, yang *Culture conflict theory* terdiri dari *subculture theories*, yang kemudian terbagi menjadi *subculture of violence*. Teori *subculture* timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas. Contohnya adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 58

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 59

mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas menengah keatas. kemudian terbagi menjadi *subculture of violence*. Teori subculture timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari mainstream (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas. Contohnya adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas menengah keatas.

Dengan begitu anak-anak kelas bawah berusaha beradaptasi dengan kehidupan mewah kelas menengah keatas, akan tetapi anak-anak kelas bawah sulit menjangkau kehidupan kelas menengah keatas. Maka hal seperti inilah yang membuat frustrasi dan tekanan pada anak tersebut, sehingga memungkinkan terjadi tingkat kejahatan, untuk mengikuti gaya hidup lingkungan kelas menengah keatas.

Pada teori *subculture of violence*, Marvin wolfgang dan Franc Ferracuti (61), memfokuskan pada *culture conflict* (konflik budaya) dan *violent crime* (kejahatan kekerasan). Sub budaya yang mengikuti conduct norms yang kondusif bagi kekerasan disebut dengan *subcultures of violence*. Kekerasan tidak digunakan dalam semua situasi, namun sering merupakan suatu tanggapan yang diharapkan. Jadi, anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah dengan tindakan-tindakan mereka. Sebaliknya-orang-orang yang tidak melakukan kekerasan mungkin akan

dicela. Sistem nilai seperti ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Teori Kontrol Sosial (Control Sosial Theory)

Teori kontrol atau theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr.

Reis, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control social dalam menjelaskan kenakalan remaja, antara lain:²⁰

- Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
- Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak;
- Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.

²⁰ *Ibid.*, Hlm 62

Reis juga membedakan dua macam kontrol , yaitu: personal control dan social control. personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan social control (control external) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckless, mengemukakan tentang Containment theory. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Menurut Reckless, Containment internal dan eksternal memiliki posisi yang netral, berada di antara tekanan sosial (social pressures) dan tarikan sosial (social pulls) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.²¹

Ivan F. Nye, mengemukakan teori social control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistik. Sebagai kasus delinquency menurut Ivan F. Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih penting dari penentuan tingkah laku.²²

²¹ *Ibid.*, Hlm 62

²² *Ibid.*, Hlm 63

David Matza dan Gresham Sykes, menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, juga terikat pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Matza dan Sykes juga mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Ada lima rincian tentang teknik netralisasi, antara lain sebagai berikut:²³

- Denial of responsibility, merujuk kepada suatu tanggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasahi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.
- Denial of injury, merujuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar.
- Denial of the victim, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
- Condemnation of the condemners, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan

²³ *Ibid.*, Hlm 64.

kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka, karena mereka beranggapan polisi juga selalu melakukan kesalahan.

- Appeal to higher loyalties, merujuk kepada adanya kesetiakawanan yang tinggi pada anggota kelompoknya. Travis Hirschi, mengemukakan teori control social paling handal dan sangat populer. Dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol social, memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkahlaku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.²⁴

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

²⁴ *Ibid.*, Hlm 64.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁵

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).²⁶

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

²⁵ Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77.

²⁶ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001), hlm16.

- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁷

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan,²⁸ yaitu;

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime)

Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.

²⁷ Ibid., Hlm. 16-17

²⁸ Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, (Bandung 1992), hlm 66.

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²⁹

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

²⁹ Ibid., hlm. 79.

memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.³⁰

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

³⁰ Abdul Syani. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar,1987) hlm 137.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:³¹

a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

³¹ Ibid., hlm. 139.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.³²

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan

D. Ketentuan Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan/ pencurian/ perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya.

Dalam KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) Tindak pidana begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada Pasal 365.

³² A. S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hlm. 80.

Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Unsur – unsur dalam Pasal 365 KUHP yaitu :

Unsur Objektif :

Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan., dsb.

E. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/ penusuk diatur dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 serta Undang-Undang yang berkaitan didalamnya

Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 menegaskan :

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-

nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Pasal 2 ayat 1

- Barang siapa
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia
- Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
- Dihukum dengan hukuman penjara selama
- lamanya sepuluh tahun

Pasal 2 ayat 2

- Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata
- Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

F. Jenis - Jenis Senjata Tajam

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang

digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :

- Upacara perkawinan
- Upacara pelantikan raja
- Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai,

biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunaanya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan dan penduduk yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan, yang dilakukan begal dalam beberapa tahun terakhir.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (Kantor Kepolisian).

b. Sumber Data Sekunder

Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Perkembangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di POLRESTABES Makassar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1

Jumlah Kasus Pencurian dan Kekerasan di Kota Makassar
Tahun 2011-2014 yang Dilaporkan dan Kasus yang selesai

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Selesai
1.	2011	89	29
2.	2012	101	79
3.	2013	280	93
4.	2014	255	223
5.	2015	313	190
Jumlah		1038	614

Sumber Data : Polrestabes Makassar tahun 2015

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 5 tahun mengalami peningkatan akan tetapi justru pada tahun 2014 jumlah kasus yang diselesaikan paling banyak. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2011 sebanyak 89 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 29 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 101 kasus dan yang diselesaikan 79 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 280 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 93 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 255 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 223 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 313 kasus dan yang diselesaikan 190 kasus. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, yang dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Menurut Aiptu Resky Yospih (wawancara 16 November 2015) ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
- d. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 20 para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan mengenai usia pelaku pencurian di kota Makassar yaitu:

Tabel 2

Usia Pelaku Pencurian dan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015

No.	Usia Pelaku	Frekuensi	Persentase (%)
1.	12-14	3	15%
2.	15-20	9	50%
3.	21-30	8	35%
4.	31-40	-	-
5.	>41	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data : Polrestabes Makassar 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dan kekerasan adalah pelaku yang berumur antara 15-30 tahun, mencapai 85% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis busur dan parang, ada yang hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korbannya hingga mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih

banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang

melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Faktor ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap beberapa narapidana kasus pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota besar Makassar, perhitungan pendapatan pelaku curas penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 5 narapidana yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan dibagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkatan pendapatan rendah yaitu Rp. 250.000/bulan diambil sebagai dasar tingkatan dimana angka tersebut mendekati angka pendapatan terendah dari keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai yaitu

Rp.200.000/bulan, sedangkan tingkat pendapatan tinggi adalah Rp.900.000/bulan, dimana pendapatan tersebut mendekati angka pendapatan tertinggi dari keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai yakni Rp.850.000/bulan. Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan tabel :

Tabel 3
Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Kota
Makassar Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1.	Rendah (≤ 250.000)	12	80%
2.	Sedang (251.000-900.000)	8	20%
3	Tinggi (≥ 900.000)	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber Data : Polrestabes Makassar 2015

Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 250.000 per bulan sebanyak 12 orang atau 80% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 251.000 s/d Rp. 900.000 per bulan mencapai 8 orang atau sekitar 20%. Golongan pelajar juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah karena mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, karena masih bergantung pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000/bulan.

Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 80%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan

Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang narapidana di Polrestabes Makassar yang bernama Ferdy, buruh (25 tahun) yang juga seorang pelaku pencurian dengan kekerasan mengaku mencuri kendaraan dengan kekerasan dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk membiayai istri dan 6 orang anaknya. Ia sempat mengalami frustrasi akibat tidak ada satupun tempat yang didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat seorang diri untuk mencuri motor dengan menggunakan kekerasan.

Adapun Afriadi (21 tahun) yang dulunya hanya bekerja mengantar air galon. Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan SD tidak berhasil menemukan pekerjaan baru, ia terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan untuk pertama kalinya bersama dengan teman temannya.

b. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di
Kota Makassar Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	SD	5	25%
2.	SMP	12	60%
3.	SMU	3	15%
4.	PT	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber Data : Polrestabes Makassar 2015

Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 5 orang atau 25% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari

pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Makassar pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Perasyarakatan Makassar bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada dalam lembaga perasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 4 pelajar SMP dan SMU Darussalam yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, begitu pula

kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan 20 narapidana kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Makassar, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian dengan kekerasan. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

F. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan

atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku,

pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.³³

- a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

³³ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta 1987), hlm 42

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Aiptu Resky Yospiyah (dalam wawancara pada tanggal 16 november 2015), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi

dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.

3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi

hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap .

DAFTAR PUSTAKA

A. S. Alam, Dan Amir, Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Abdul Syani, 1987, Sosiologi Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.

Baharuddin Lopa, Moch Yamin, 2001, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Bandung.

Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

Chainur Arasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kartini Kartono, 1986, Patologi Sosial Kenakalan Anak, Jakarta Utara, Rajawali Pers.

Mulyana Kusumah, 1981, Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung.

R.Abdoel Djamali, 2005, Pengantar ilmu Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada.

Romli Atamassasmita, Teori dan kapita selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung.

Soejono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, jakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta.

Yasmin Anwar Adang; 2010: Kriminoligi. PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<http://beritakotamakassar.com/makassar-dijajah-begal-kapolda-baru-harus-tegas/> diakses pada tanggal 8 oktober 2015

<http://senjatajam.blogspot.com/> diakses pada tanggal 8 oktober 2015

<http://reginafadjiandira.blogspot.com/2015/02/begal-ditinjau-dari-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 8 oktober 2015

<http://news.liputan6.com/read/2187533/2-kawanan-begal-di-makassar-lumpuh-ditembak-polisi> diakses pada tanggal 8 oktober 2015

<http://unjalu.blogspot.co.id/2011/03/delik-delik-dalam-kuhp.html> diakses pada tanggal 12 oktober 2015